

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengungkapan atas laporan keuangan terbagi menjadi dua sifat, pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required / regulated / mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) (Suhardjanto, 2012), pengungkapan bertujuan penyediaan informasi dalam statemen keuangan, catatan atas statemen keuangan dan pengungkapan tambahan berkaitan dengan statemen keuangan Evans (2003) dalam Soewardjono (2005:578)

Peraturan tentang standar pengungkapan informasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum untuk perusahaan publik yaitu, Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dari Laporan Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan sehingga pengungkapan wajib harus diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, dan adanya pengendalian terkait dengan kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi (Adina dan Ion, 2008). memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan

jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010).

Di Indonesia sendiri kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan menjadi bukti bahwa kepatuhan wajib masih kurang penerapannya, PT Petromine Energy Trading merupakan anak perusahaan dari PT Bakrie & Brothers. PT Petromine Energy Trading melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penyajian pendapatan yang dihasilkan dari penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo pada tahun 2011. Pendapatan tersebut memiliki nilai sebesar Rp 1,37 triliun. Adanya kasus tersebut membuat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) yang sekarang berubah menjadi OJK memberikan sanksi kepada PT Bakrie & Brothers berupa denda sebesar Rp 4 miliar.

Mandatory disclosure sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keuangan yang diungkapkan, maka perusahaan akan dipandang berkualitas baik. Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat mencapai target dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang relevan untuk membuat keputusan dengan adanya informasi yang diungkapkan. Kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan tersebut meningkat. Pengungkapan dan transparan dalam laporan keuangan juga akan menambah nilai bagi para *stakeholders*. Jika tidak ada

pengungkapan yang memadai, para *stakeholders* tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan

Penyajian dan pengungkapan informasi pada laporan keuangan merupakan upaya untuk membantu para pembaca dan pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dengan begitu diperlukan standar akuntansi yang secara umum di terima sebagai aturan yang baku, yang didukung sanksi-sanksi untuk ketidakpatuhan dalam pelaporan (Belkaoui, 2016, dalam Chariri dan Kusuma, 2010). Standar akuntansi yang berkualitas terdiri dari prinsip-prinsip komperhensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat di andalkan (Situmorang, 2011 :1).

Fauziah (2015) meneliti mengenai Pengaruh corporate governance terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013. Hasil dari penelitian pada tahun 2012 perusahaan menyajikan dan mengungkapkan laporan laba rugi komperhensif pasca konvergensi IFRS sebesar 59.35% item pengungkapan dan pada tahun 2013 telah mengungkapkan sebesar 60.12% item pengungkapan wajib. Dengan kata lain penyajian pengungkapan laporan keuangan masih jauh dari ideal yaitu 100%.

Terungkapnya kasus pimpinan puncak Toshiba Corporation terlibat secara "sistematis" dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dollar AS selama beberapa tahun. Tim independen yang dibentuk Toshiba mengatakan bahwa hal tersebut menyengat salah satu perusahaan terkenal di Jepang, dan Toshiba harus menyatakan kembali

keuntungan sebesar 151,8 miliar yen untuk periode antara April 2008 hingga Maret 2014. Akuntansi secara sistematis dilakukan sebagai akibat dari keputusan manajemen (Sukmana, 2015).

Dari kasus di atas menjelaskan bahwa *corporate governance* memiliki peranan yang penting dalam pengambilan keputusan dalam penyajian laporan keuangan, oleh karena itu pelaksanaan *corporate governance* merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menghindari permasalahan yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan. Dibutuhkannya *corporate governance* digunakan sebagai pendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan juga konsisten (Novianti, 2009).

Dengan adanya pengungkapan dan transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) mempublikasikan sebuah survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers pada investor internasional di Asia, yang menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada salah satu yang terburuk dalam standar audit dan kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi (Utami et al., 2012).

Menurut Novianti (2009), *good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dan *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, oleh karena itu tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menurunkan konflik yang telah terjadi antara pemilik (principal) dengan manajemen (agent) adalah dengan menawarkan seorang manajer untuk berpartisipasi dalam suatu program opsi saham yang biasa dikenal sebagai kompensasi berbasis saham. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh seorang manajer. Nilai perusahaan dapat terjadi akibat motivasi seorang manajer perusahaan dalam mengendalikan laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Motivasi atau keinginan manajer yang berbeda maka akan menghasilkan besaran hasil untuk nilai perusahaan baik sesuai keinginan yang berbeda pula (Linda, 2016)

Keberadaan komisaris independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya. Semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan

dengan kepentingan pihak lain. Untuk lebih dapat mencapai good corporate governance.

Selain kepemilikan manajerial dan komisaris independen komite audit juga diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan tugas - tugasnya. Hal ini seperti diungkap penelitian Wijdayanti (20015) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan wajib, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit mampu mengurangi pengungkapan wajib.

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik pengungkapan pada perusahaan tersebut. Tujuan utama perusahaan beroperasi bukanlah untuk memenuhi kepentingannya sendiri melainkan untuk melayani tujuan publik yang lebih luas yaitu dengan memberi manfaat (nilai) kepada masyarakat (Scott, 2003: 454 dalam Prasetyo, 2012). Menurut Amran *et al.* (2009) dalam Suta dan Laksito (2012), semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin meningkat pula jumlah *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi lebih luas sebagai salah satu cara untuk melayani tujuan publik tersebut, seperti yang terjadi pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).

Kamaludin (2014) dalam tulisannya menyebutkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), melalui anak perusahaannya, PT Telkom International (Telin), telah mengakuisisi Contact Centres Australia

(CCA) pada akhir September tahun 2014 lalu, bersamaan dengan hal ini, Telkom sudah memasuki pasar telekomunikasi di delapan Negara yang akan melibatkan berbagai pihak dengan Group Telkom. Hal ini bertujuan untuk mencapai target pendapatan 100 miliar ditahun 2015 dan memperkuat kepercayaan pasar maupun investor terhadap perusahaan (sumber: www.katadata.co.id diakses tanggal 10 Januari 2019). Peristiwa tersebut mencerminkan bahwa perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Nuryaman, 2009).

Secara umum, Penelitian terkait dengan pengungkapan wajib ini dilakukan karena pengungkapan wajib pada perusahaan masih cukup rendah, Pengungkapan wajib menjadi salah satu penilaian bagi para stakeholder untuk menentukan pilihan, Keberadaan pengungkapan wajib diwajibkan keberadaannya bagi perusahaan dengan dikeluarkannya peraturan oleh OJK yaitu BAPEPAM-LK No.347/BL/2012 tentang pengungkapan wajib. Perusahaan sektor manufaktur memiliki kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor lain, sehingga peneliti memilih sektor manufaktur Hasil penelitian terkait dengan pengungkapan wajib terdahulu menunjukkan ketidak konsistenan hasil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengaruh pengungkapan wajib.

Oleh karena ini peneliti ingin meneliti kembali atas apa yang dilakukan Isna Fauziah pada tahun 2015 dengan memberikan tambahan variabel serta

menggunakan periode tahun yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ini mengambil judul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang hendak di teliti dalam penelitian ini adalah sebgai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada perumusan masalah diatas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara komisari independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara jumlah komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif antara jumlah ukuran perusahaan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi, serta masyarakat akan mendapatkan informasi bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pelaporan keuangan. Dan untuk penelitian berikutnya sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan topik ini.

2. Kegunaan Praktis

Regulator, yaitu OJK, BEI, dan BI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan peran tata kelola perusahaan, dengan penelitian ini diharapkan investor menjadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan bisnis serta manajemen diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan internal control perusahaan.